



LAPORAN KINERJA

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

(Komplek Kantor Bupati)
 Alamat : Kompleks Kantor Bupati Morowali Utara
 Jln. Bumi Nangka - Kolonodale Kode Pos 94671

VISI DAN MISI
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

VISI : **"MENINGKATKAN ETOES KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PEMERATAAN DI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA"**.

MISI :

1. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Perekonomian Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
2. Melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah kabupaten morowali utara yang merata dan berkeadilan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Perekonomian Daerah.

DAFTAR ISI

1.	VISI DAN MISI		
2.	KATA PENGANTAR		
	i	
3.	DAFTAR ISI		
	ii	
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1 LATAR BELAKANG		1
	1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA.....		1
	1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA		2
	1.4 STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI		2
BAB II	PERENCANAAN KINERJA		4
	2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.....		4
	2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH		4
	2.3 VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH		5
	2.3.1 VISI.....		5
	2.3.2 MISI		5
	2.4 SASARAN DAN TUJUAN		5
	2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA		6
	2.6 PERJANJIAN KINERJA		7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		8
	3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.....		8
	3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		8
	3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....		10
BAB IV	PENUTUP		13
	4.1 KESIMPULAN.....		13
	4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA		13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bagian Perekonomian dan SDA dibentuk pada tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari dua Asisten maka setelah diadakan pemetaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian Perekonomian dan SDA yang semula bernama Bagian Adm Perekonomian sekarang setelah dibawah Asisten Dua sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Perekonomian dan SDA pada Tahun 2020

1.2 Gambaran Umum Bagian Perekonomian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengkajian rumusan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan perekonomian dan Sumber Daya Alam daerah.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan program dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Perumusan bahan koordinasi penyelenggara tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Perumusan bahan pembinaan administrasi dibidang Perekonomian dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Perumusan bahan evaluasi penyelenggaraan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Perekonomian;
- e. Perumusan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Kesejahteraan Perekonomian dan SDA

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .
6. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui

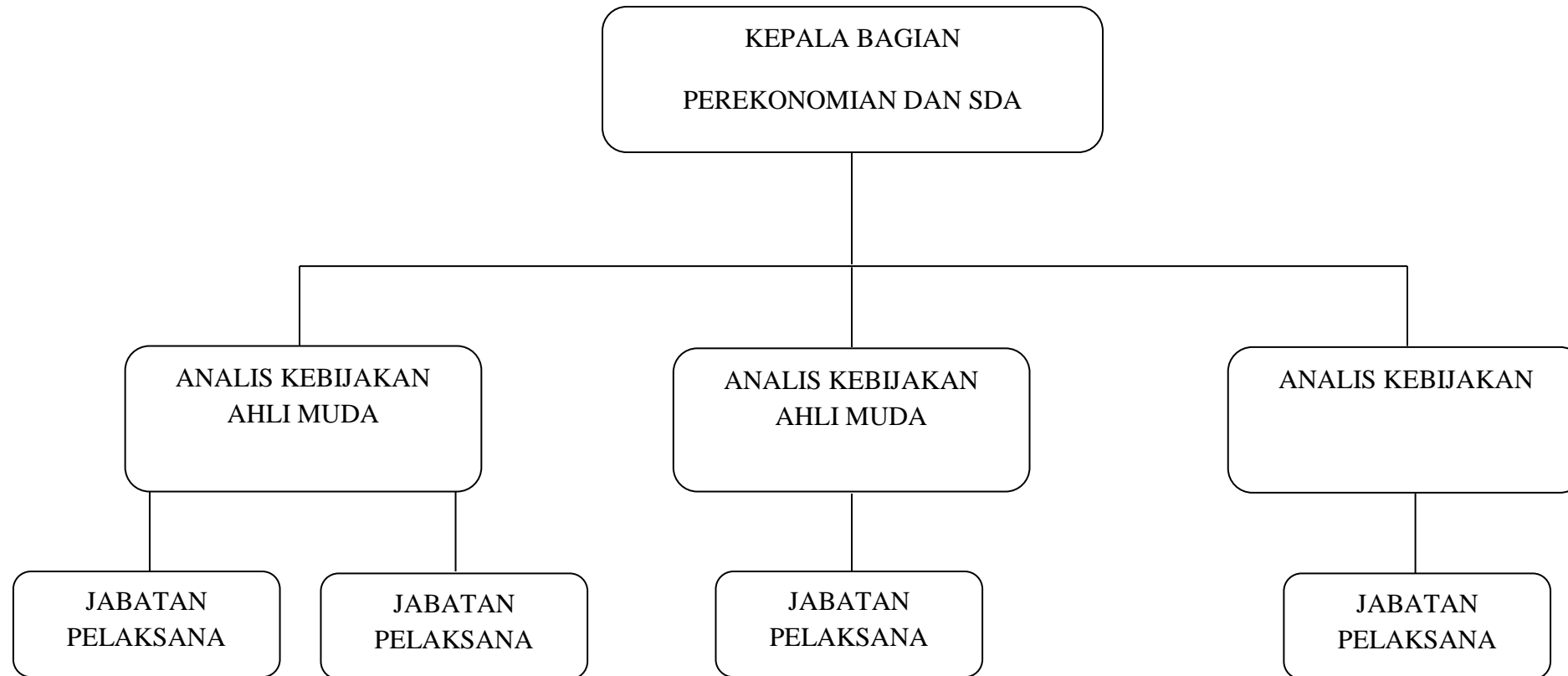
inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one innovation).

7. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
8. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
9. Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1.4 STRUKTUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Rencana Strategi Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Perekonomian Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
- b. Melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah Kabupaten Morowali Utara yang merata dan berkeadilan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***“Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Perekonomian dan SDA terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA AGAMIS, AMAN TENTRAM DAN DAMAI”

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perkonomian daerah
2. Peningkatan sarana dan prasarana Perekonomian Daerah
3. Mewujudkan Kestabilan Perekonomian Daerah
4. Perencanaan dan pemantauan pembinaan Perekonomian tepat sasaran secara berkesinambungan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2021-2026 dengan kinerja resntra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Perekonomian dan SDA dengan Kinerja Kepala Daerah.

**KESELARASAN KINERJA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA**



2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

1. Tujuan

Tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara meniti beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

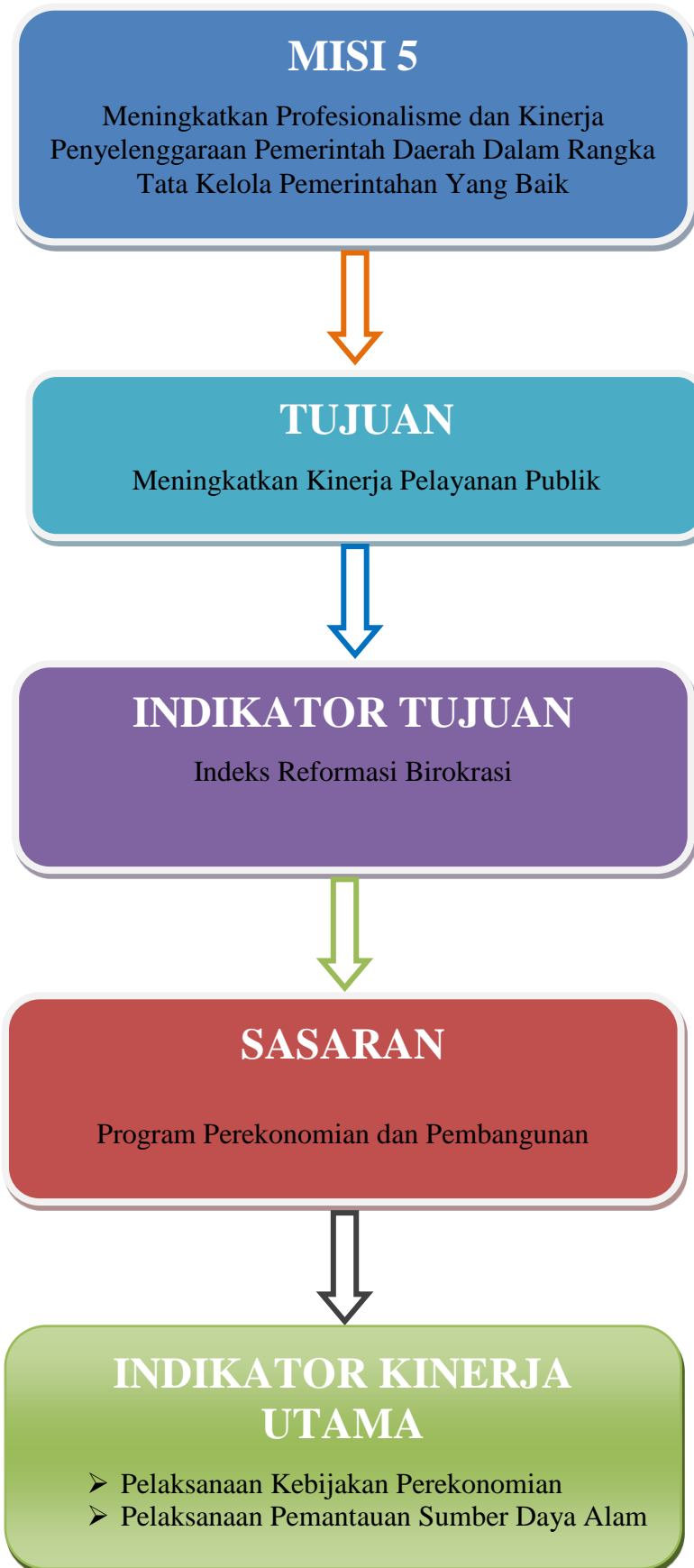
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Perekonomian dan SDA :

CASCADING BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah		Bagian Ekon - SDA
		- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %	Bagian Ekon- SDA
		- Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %	

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Perekonomian dan SDA yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Program pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah		
	- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	Dokumen	14 Dokumen
	- Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	20 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 400.657.550 | APBD 2022 |
| 2. Program Perekonomian dan Pembangunan | Rp. 297.033.475 | APBD 2022 |

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **697.691.025** (**Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah**).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	14 Laporan	13	91%	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %
2	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	20 Laporan	19	91%	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana : Jumlah Kegiatan X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 <$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebanyak 2 sasaran dan 4 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 setelah APBD perubahan.

Dari 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \leq$	2	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	0	Tinggi
3	$66 \leq 75$	0	Sedang
4	$51 \leq 65$	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	2	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	14 Dokumen	13	91%	√				
2.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam	20 Dokumen	19	91%	√				
CAPAIAN RATA-RATA				91%					

- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual**
Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah dengan capaian Kinerja rata-rata **91%** dengan Predikat **Sangat Baik** dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi paket Kebijakan Sumber Daya Alam dengan capaian Kinerja rata-rata **91%** dengan Predikat **Sangat Baik** Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 Bagian Perekonomian dan SDA menargetkan 14 Laporan dan yang terealisasi dari Indikator Kinerja 1 hanya 13 Dokumen dan dari Indikator ke 2 hanya 19 Dokumen, ini disebabkan ada Dua Dokumen yang tidak terlaksana dari yang ditargetkan.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	-	-	13	91%
2	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam			19	91%

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Terlaksananya Kegiatan Penendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan SDA, dengan persentase realisasi kinerja 13 dan capaian kinerja 91% dan persentase realisasi kinerja 19 dan capaian kinerja 91% Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja **sangat baik** yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja ini tahun 2022

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana
Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan Evaluasi Program Perekonomian Daerah	-	-	13	91%
2	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Kebijakan Sumber Daya Alam			19	91%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kerjanya $\leq 91\%$ (Sangat baik)

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk peningkatan perekonomian daerah

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Perekonomian dan SDA.
- Peningkatan Perekonomian

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan SDA dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 697.691.025
2	Belanja Modal	Rp. -
Alokasi Total Belanja		Rp. 697.691.025

Dari total anggaran sebesar Rp. 22.122.638.760 tersebut sampai akhir Tahun 2022.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 697.691.025
2	Belanja Modal	Rp. -
Alokasi Total Belanja		Rp. 697.691.025

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 697.691.025
2	Belanja Modal	Rp. -
Alokasi Total Belanja		Rp. 697.691.025

$$a. \text{ Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$$

$$= \text{Rp. } \frac{697.691.025}{697.691.025} \times 100\%$$

Rp. -

$$= 100\%$$

$$b. \text{ Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$$

$$= \text{Rp. } \frac{697.691.025}{697.691.025} \times 100\%$$

Rp. -

$$= 100\%$$

$$c. \text{ Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja} \times 100\%}{\text{Alokasi Total Belanja}}$$

$$= \text{Rp. } \frac{697.691.025}{697.691.025} \times 100\%$$

Rp. -

$$= 100\%$$

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 8 (Delapan) dan 22 (Dua Puluh Dua) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Perekonomian dan SDA
 - Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Perekonomian dan SDA, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Kesra dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR
SASARAN TAHUN 2022**

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.657.550	400.657.550	100%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	297.033.475	297.033.475	100%
Jumlah			697.691.025	697.691.025	100%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 2 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Perekonomian dan SDA

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Perekonomian dan SDA ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Maret 2023

KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA



ROYKE TOBIGO, SE, MM
NIP. 19761017 200312 1 002